

KORUPSI JUAL-BELI BBM NONTUNAI Polri Sita Alat Bukti Elektronik dari PT Pertamina Patra Niaga

JAKARTA (IM) - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyita sejumlah barang bukti hasil pengeledahan di tiga lokasi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli bahan bakar minyak (BBM) nontunai periode 2009-2012.

Penyidik Polri melakukan pengeledahan di kantor PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) dan kantor PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT).

"HP 6 unit posisi mati dan dokumen ada yang dilakukan penyitaan klarifikasi verifikasi terkait dengan perkara," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo saat dikonfirmasi Jumat (11/10).

Selain itu, penyidik juga menyita laptop, serta sejumlah barang bukti elektronik lainnya. Menurut dia, data server dari barang bukti elektronik yang disita itu akan diperiksa lebih lanjut oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.

"Data dari server akan diperiksa oleh Puslabfor," ucapnya.

Cahyono mengatakan, pengeledahan di kantor Pertamina Patra Niaga Patra berlangsung hingga malam hari. Adapun alamat lokasi pengeledahan adalah Kantor Pusat PT Pertamina Patra Niaga yang beralamat di Gedung Wisma Tugu II Jalan

HR Rasuna Said, Kavling C7-9, Kuningan, Karset, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan.

Kemudian, Kantor PT Pertamina Patra Niaga pada Ruang Informasi Teknologi (IT) yang beralamat di Gedung Sopo Del Tower Jalan Mega Kuningan Barat III, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan.

Pengeledahan juga dilakukan di kantor PT AKT, Jalan Budi Kemuliaan Gambir, Jakarta Pusat.

Cahyono mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi tersebut telah merugikan negara sebesar Rp 451.663.843.083,20, atau lebih kurang Rp 451,66 miliar. Pengeledahan dilakukan guna mencari barang bukti dokumen yang terkait dengan perkara, dokumen transaksi keuangan, dan bukti-bukti aliran transaksi keuangan.

Selain itu, mencari barang bukti elektronik yang terkait dengan korespondensi para pihak, barang bukti elektronik yang terkait dengan transaksi jual-beli BBM secara nontunai dan transaksi pembayaran, serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

"Kegiatan pengeledahan ini juga melibatkan tim dari Dittipidsiber Bareskrim Polri dan Puslabfor Polri guna penanganan barang bukti elektronik dari hasil kegiatan pengeledahan," ucap Cahyono pada 9 November 2022. ● lus

FOTO: FRANS



Kapolri Didesak Bentuk Tim Khusus Usut Isu Kabareskrim Terima Uang dari Tambang Ilegal

Prodem sebut oknum Bareskrim tekan Ismail Bolong buat video bantahan atas videonya yang menyebut keterlibatan Komjen Agus dalam suap tambang ilegal.

JAKARTA (IM) - Ketua Majelis Jaringan Aktivistis Pro-Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan suap perusahaan tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) yang menyeret nama Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Agus Andrianto.

Prodem mengaku telah menemukan adanya laporan hasil penyelidikan bahwa Komjen Agus Andrianto terlibat dalam kasus penerimaan uang terkait penambangan ilegal tersebut.

"Prodem mendesak Ka-

polri Jenderal Listyo Sigit segera membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto atas dasar Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Paminal Propam," ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Jumat (11/11).

Tak hanya itu, menurut Iwan, pihaknya juga mendapat informasi bahwa tim penyelidikan Paminal Propam Polri yang mengusut soal dugaan penerimaan gratifikasi atau suap dalam kegiatan penambangan batu bara ilegal itu ditahan di tempat khusus (patsus).

Iwan kemudian meminta Kapolri membebaskan tim penyelidikan yang dipatuskan

tersebut.

"Karenanya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit segera membebaskan tim penyelidikan Paminal Propam yang dipatus," katanya.

Selain itu, Prodem mengaku mendapat informasi ada anggota Bareskrim Polri berpangkat Kombes bernisial YU diduga telah melakukan upaya obstruction of justice dengan menekan Ismail Bolong dalam kaitannya video bantahan.

Ismail Bolong adalah anggota polisi yang sempat mengungkapkan keterlibatan Komjen Agus dalam kasus suap tambang ilegal. Namun, tak lama videonya viral, Ismail Bolong langsung membuat video klarifikasi.

Prodem sebelumnya mengaku telah melakukan investigasi dan menemukan adanya penyelidikan internal yang dilakukan Biro Paminal Propam Polri terkait dengan kegiatan penambangan ilegal

yang ada di Kaltim.

Saat itu, Kepala Divisi Propam Polri masih dijabat oleh Irjen Ferdy Sambo yang kini sudah dipecat karena kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat.

"Di sini sudah dijelaskan bahwa Komjen Pol Agus Andrianto menerima uang koordinasi yang diberikan oleh yang namanya Ismail Bolong. Itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Karo Paminal, itu kenapa sampai hari ini dari bulan Februari dan suratnya ditulis oleh Kadiv Propam rekomendasinya itu April itu per tanggal 7 April itu sudah diserahkan surat itu kenapa tidak dilakukan penindakan,"

POLRI DAN TNI GELAR GELADI PENGAMANAN TAMU VIP KTT G20 DI BALI

TNI-Polri menggelar geladi utuh pasukan pengamanan VVIP di seluruh lokasi kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Jumat (11/11). Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, dalam geladi ini terdapat 42 rangkaian kegiatan yang disimulasikan pengambilan dan penambutan para kepala negara mulai dari tiba di lokasi hingga berpindah lokasi.



FOTO: FRANS

KAPOLDA DIY BERSILATURAHMI KE GUS MIFTAH Kapolda DIY Irjen Pol. Suwondo Nainggolan bersilaturahmi dengan Gus Miftah untuk mempererat sinergitas Polda DIY dengan tokoh agama pada Jumat (11/11). Irjen Yuliyanto mengatakan, silaturahmi ini merupakan agenda kerja Kapolda sebagai pejabat baru di Polda DIY. Peran seluruh lapisan masyarakat dan para tokoh agama sangat penting untuk bersama-sama menjaga dan menciptakan Yogyakarta yang aman dan kondusif.

Anak Anggota DPRD Kota Bekasi Korban Tabrak Lari, Polisi Sudah Periksa Tiga Saksi

BEKASI (IM) - Kepolisian Resor (Polres) Metro Bekasi Kota masih terus menyelidiki kasus tabrak lari yang dialami oleh Muhammad Naufal Rahman (25). Naufal, anak Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim.

"Posisi sedang macet, tapi disuruh maju sama petugas security, karena biar lancar. Nah, pas di simpang itu, datang mobil, mau tabrak saya. Saya diam, saya lihatin, kemudian dia buka kaca," ujar Naufal.

Pengemudi mobil yang merasa Naufal melanggar rambu lalu lintas, memaki Naufal dengan ujaran berbau rasis.

Naufal yang merasa terhina, lantas mengikuti mobil tersebut. Ia hanya berniat bertanya, apa maksud dari makian rasis tersebut. Ketika didekati, Naufal justru jadi korban tabrak lari.

"Dia (pengemudi mobil) hantam saya sekali, saya goyang sedikit. Nah, yang kedua kali, saya dekati lagi, justru saya dihantam habis sampai jatuh," jelas Naufal.

Begitu ia dan bibinya jatuh, sang pengemudi mobil itu pun langsung bergeser meninggalkan lokasi. Beruntung, Naufal dan bibinya hanya terkena luka ringan tanpa perlu mendapat perawatan intensif.

Kanit Gakkum Polres Metro Bekasi Kota Iptu Sahari membenarkan peristiwa yang terjadi. Ia menyebut, bahwa polisi tengah menyelidiki kasus tabrak lari tersebut.

"Penyelidikan. Kami masih berupaya untuk mencari bukti pendukung lain," jelas Sahari. ● lus

Pengemudi yang Tutupi Pelat Nomor Pakai Lakban Hanya Diberi Teguran

JAKARTA (IM) - Aparat Polda Metro Jaya tidak menilang secara manual pengemudi mobil yang kedapatan menutup pelat nomor kendaraannya dengan lakban. Hal ini dilakukan untuk menghindari kamera Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menjelaskan, petugas hanya memberikan teguran lisan meski tindakan pengemudi yang menutupi pelat nomor kendaraannya merupakan pelanggaran.

"Sementara ini belum menilang secara manual, jadi menindak bukan harus menilang. Kalau mereka istilahnya masih bisa diperingatkan untuk dilepas, ya dilepas," ujar Latif saat dikonfirmasi, Jumat (11/11).

Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, kata Latif, surat-surat kendaraan dinyatakan lengkap dan sesuai. Setelah itu, pengendara tersebut dipersilakan melanjutkan

perjalanan. "Enggak sanksi pidana tidak ada, itu kan pelanggaran. Jadi setelah itu dihentikan dicek surat-surat kendaraannya, benar atau tidak? Kalau benar, suruh dilepas saja untuk diperingatkan," katanya. Sebelumnya, seorang pengemudi mobil kedapatan menutup pelat nomor kendaraannya menggunakan lakban hitam untuk menghindari tilang elektronik dengan kamera E-TLE.

Latif Usman mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Simpang Ragunan, Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan. Petugas kepolisian yang sedang mengatur lalu lintas di lokasi pun langsung memberhentikan mobil tersebut dan memberikan teguran lisan kepada pengemudi.

"Tentunya itu anggota sudah benar melakukan tindakan itu menghentikan, cek kendaraan untuk membuka itu," ujar Latif saat dikonfirmasi, Jumat (11/11).

Dalam video yang diunggah

akun Instagram @TM-CPoldaMetro, seorang polisi terlihat memberhentikan mobil berwarna silver. Angka di pelat nomor kendaraan bagian depan dan belakang tampak ditutup menggunakan lakban. Sambil diberi peringatan, petugas langsung meminta sang sopir mencopot lakban tersebut agar tidak menutupi pelat nomor kendaraan.

Seperti diketahui bahwa Polda Metro Jaya resmi menghentikan pelaksanaan tilang manual terhadap para pelanggar lalu lintas sejak beberapa waktu lalu, sesuai instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Seluruh surat tilang yang sudah diedarkan kepada anggota polisi lalu lintas telah ditarik. Untuk wilayah DKI Jakarta, kepolisian mengandalkan kamera E-TLE statis sudah terpasang di 57 titik. Selain itu, Polda Metro Jaya juga akan menggunakan E-TLE Mobile yang menurut rencana bakal diluncurkan pada Desember 2022. ● lus



FOTO: ANTARA

ATURAN UJIAN ULANG PEMBUATAN SIM

Seorang pemohon surat ijin mengemudi (SIM) melakukan tes berkendara di Satpas 1221 Pasar Segar, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (11/11). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi mengeluarkan arahan terbaru perihal peraturan pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) melalui surat telegram mengatakan pemohon boleh ujian SIM ulang di hari yang sama apabila tidak lulus tes pembuatan SIM dengan aturan tertentu.

Polri Ungkap Modus CV SC Oplis Obat dengan Memasukkan PG dan EG

JAKARTA (IM) - Polri mengungkap modus CV Samudera Chemical (SC) meracik obat yang memuat kandungan PG dan EG berlebih. Hal itu didapat dari hasil penyelidikan di kantor CV SC yang beralamat di Tapos, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/11).

Guna menelusuri dugaan itu, Ramadhan menyampaikan, penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap pemilik CV SC yang berinisial E serta anaknya berinisial T.

"Rencana tidak lanjut nya akan melakukan pemanggilan terhadap saudara E selaku pemilik CPSC, saudara T anak dari E dan saksi-saksi RT dan RW," ujar Ramadhan.

Penyidik juga tengah menunggu hasil laboratorium terhadap sampel bahan baku yang diuji dan melengkapi BAP PT APG dan PT TBK.

"Mencari dokumen terkait pembelian bahan baku tambahan PG dari PT AF, PT TBK dan PT APG, melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli korporasi, ahli farmasi dan ahli labfor," ujar Ramadhan. ● lus

Polisi Sita Aset Tersangka Kasus Net89, Termasuk Bandana dari Atta Halilintar

JAKARTA (IM) - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipidek) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyita sejumlah aset milik tersangka kasus dugaan tindak pidana penipuan investasi robot trading Net89.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menerangkan, penyitaan dilakukan terhadap barang yang diduga hasil kejahatan penipuan robot trading.

Adapun barang yang disita meliputi kendaraan roda empat hingga bandana.

"Dari tersangka AL (Alwin Aliwarga) disita satu unit mobil senilai Rp1,5 miliar," kata Ramadhan dalam keterangannya yang dikutip Jumat (11/11).

Tak hanya dari tangan Alwin, penyidik juga menyita sejumlah barang milik tersangka Reza Shahrani (RS).

Dari tangan Reza, menyita dua unit mobil seharga Rp2,7 miliar dan Rp690 juta. Tak hanya itu, penyidik juga menyita bandana Reza yang dibeli dari publik figur Atta Halilintar dan satu unit sepeda yang dibeli dari YouTuber Taqy Malik.

"Satu buah headband atau ikat kepala senilai Rp2,2 miliar dan satu unit sepeda senilai Rp777 juta," terang Ramadhan. Dalam kasus ini, polisi

telah menetapkan delapan orang tersangka. Delapan tersangka itu adalah AA yang merupakan pendiri atau pemilik Net89 PT SMI dan memberikan petunjuk tentang skema bisnis serta cara memasukkan investasi robot trading.

Kemudian LSH, selaku direktur Net89 PT SMI yang selalu bersama-sama dengan AA. Selanjutnya ESI merupakan founder Net89 PT SMI yaitu tempat tujuan para member menyetorkan dananya dan asal pencairan dana kepada para member net89.

Kemudian 5 orang berinisial RS, AL, HS, FI, dan D sebagai sub exchanger.

Atas perbuatannya, para tersangka terancam pasal berlapis. Di antaranya, Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 106 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 105 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kemudian Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian (TPPU) dengan ancaman maksimal 20 tahun. ● lus